



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

**ANALISIS KONSEP *VALUE FOR MONEY* KINERJA
KEUANGAN PADA KEGIATAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh :

**NUR HATIKAH SIREGAR
NIM : 18 402 00150**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**ANALISIS KONSEP *VALUE FOR MONEY* TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PADA KEGIATAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

OLEH :

**NUR HATIKAH SIREGAR
18 402 00150**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



ANALISIS KONSEP *VALUE FOR MONEY* TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PADA KEGIATAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN MANDAILING NATAL

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

OLEH :

NUR HATIKAH SIREGAR
18 402 00150

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

Rodame Monitorir Napitupulu, M.M.
NIP. 19841130 201801 2 001

PEMBIMBING II

Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E
NIP. 19930227 201903 1 008

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Kota Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Nur Hatikah Siregar**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 20 Oktober 2022

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Nur Hatikah Siregar** yang "**Analisis Konsep Value For Money Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Rodame Monitorir Napitupulu, M.M
NIP. 198411302018012001

PEMBIMBING II

Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E
NIP.199302272019031008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hatikah Siregar
NIM : 1840200150
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Konsep *Value For Money* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 Oktober 2022
Saya yang Menyatakan,



Nur Hatikah Siregar
NIM. 1840200150

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hatikah Siregar
NIM : 1840200150
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Analisis Konsep Value for Money Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mandaling Natal.**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 20 Oktober 2022
Yang menyatakan,



Nur Hatikah Siregar
NIM.1840200150



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733

Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : NUR HATIKAH SIREGAR
NIM : 18 402 00150
FAKULTAS/PRODI : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Konsep *Value For Money* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal.

Ketua,

Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si
NIP. 197808182009011015

Sekretaris,

Azwar Hamid, M.A
NIP. 198603112015031005

Anggota

Dr. Darwis Harahap, M.Si
NIP. 197808182009011015

Azwar Hamid, M.A
NIP. 198603112015031005

Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, M.E
NIP. 199302272019031008

Ja'far Nasution, Lc., M.E.I
NIDN. 2004088205

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa, 13 Desember 2022
Pukul : 14.00 WIB s/d 17.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus / 79 (B)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Konsep *Value For Money* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal.

Nama : Nur Hatikah Siregar

NIM : 18 402 00150

Tanggal Yudisium : 28 Januari 2023

Indeks Prestasi Akumulatif : 3,57

Predikat : Pujian

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)** Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 17 April 2023

Dekan


Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Nur Hatikah Siregar

Nim : 18 402 00150

Judul Skripsi : Analisis Konsep *Value For Money* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal.

Pengukuran kinerja merupakan faktor penting di dalam suatu organisasi, termasuk juga untuk organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Pengukuran kinerja sektor publik termasuk Dinas Sosial dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Salah satu pengukuran kinerja yang dapat memberikan tiga maksud tersebut yaitu dengan *Value For Money*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dan berkaitan dengan ilmu akuntansi sektor publik yaitu analisis kinerja keuangan dengan menggunakan konsep *value for money* digunakan untuk menilai kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal. Sehubungan dengan itu pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah teori-teori yang berkaitan dengan kinerja keuangan dan dianalisis dengan konsep *Value for money*, dilihat dari segi ekonomi, efisien, dan efektivitas.

Hasil penelitian ini adalah bahwa untuk kinerja keuangan pada ketiga program Dinas Sosial Kabupaten ekonomi karena <100%, output kegiatan tersebut tercapai secara maksimal yaitu sebesar <100%. Hal ini menunjukkan Dinas Sosial dapat mengefisienkan anggarannya, serta efektivitas dalam pelayanannya.

Kata Kunci: Konsep *Value For Money*, Kinerja Keuangan Sektor Publik

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“Analisis Konsep Value For Money Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal”** Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, serta Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Keuangan, serta Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Replita, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari, M.A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, serta Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Rodame Monitorir Napitupulu, M.M selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Wandisyah R. Hutagalung selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.

7. Teristimewa peneliti ucapkan terimakasih kepada Ibunda peneliti Nurma Hutasuhut dan Ayahanda peneliti Arif Siregar, yang selalu memberikan nasehat kehidupan agar tetap semangat dan ikhlas menjalani semua aspek kehidupan ini, berkat doa-doa mereka peneliti bisa berada sampai tahap sekarang, kemudahan yang peneliti peroleh selama melakukan penelitian ini merupakan berkat doa dan ridho kedua orang tua saya.
8. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada Kakak peneliti Almh. Parida Hanum Siregar,S.Pd., Abang peneliti Hairul Anwar Siregar. Adik peneliti Anggita Fadila Nazwa Siregar yang selalu memberikan peneliti motivasi agar tetap semangat dan pantang menyerah.
9. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada sahabat peneliti, Fitri Sri Mahyuni Rambe, Fetti Afifah Pohan, Kartika Rahma Lubis, Manna Sari Nasution,yang telah menemani dan membantu saya dalam pembuatan Skripsi ini.
10. Ucapan terimakasih kepada teman Magang, Juriah Batubara, Rina Rambe, Fadhil Assura Nasution, yang telah membantu saya dalam penelitian.
11. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada sahabat dan teman-teman peneliti di IAIN Padangsidimpuan pada umumnya angkatan 2018 dan khususnya sahabat serta teman Asrama F2 angkatan 2018, sahabat serta teman Akuntansi Keuangan 2 angkatan 2018, sahabat PEjuang TOga, sahabat saKOS yang telah memotivasi peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Oktober 2022

Peneliti

Nur Hatikah Siregar

NIM. 18 402 00150

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—َ	fathah	A	A
—ِ	Kasrah	I	I
—ُ	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ.....	fathah dan wau	Au	a dan u

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yakni huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yakni:

ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yakni huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Batasan Istilah.....	9
F. Tujuan Penelitian.....	11
G. Kegunaan Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori.....	14
1. Kinerja.....	14
2. Indikator Kinerja	16
a. Indikator masukan (<i>inputs</i>)	16
b. Indikator keluaran (<i>outputs</i>).....	16
c. Indikator hasil (<i>outcomes</i>).....	16
3. Pengukuran Kinerja.....	17
B. Konsep <i>Value For Money</i>	21
1. Pengertian Konsep <i>Value For Money</i>	21
2. Pengukuran Konsep <i>Value For Money</i>	23
C. Pelayanan Publik.....	24
D. Penelitian Terdahulu	25
E. Kerangka Berpikir.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Subjek dan Objek	34
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	41
1. Pengukuran Ekonomi	41
2. Pengukuran Efisiensi	41
3. Pengukuran Efektivitas	41

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Sosial.....	42
1. Sejarah Singkat.....	42
2. Struktur Organisasi.....	43
B. Job Description.....	46
C. Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	52
D. Keterbatasan Penelitian.....	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA 80

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah persentase penduduk miskin kabupaten mandailing natal tahun 2017-2021	6
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel III.1 Persentase Penilaian Ekonomi	36
Tabel III.2 Persentase Penilaian Efesien.....	37
Tabel III.3 Persentase Penilaian Efektivitas.....	38
Tabel IV.1 Persentase Penilaian Ekonomi	49
Tabel IV.2 Tabel Penilaian Efisiensi.....	50
Tabel IV.3 Tabel Penilaian Efektivitas	50
Tabel IV.4 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.....	51
Tabel IV.5 Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Pada Tahun 2019-2021(Dalam Ribuan Rupiah)	60
Tabel IV.6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Tahun 2019-2021(Dalam Ribuan Rupiah)	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Mandailing Natal tahun 2017-2021	6
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan dan perlindungan sosial¹.

Sektor publik adalah pemberi pelayanan publik seperti, pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, menyediakan bahan baku untuk kebutuhan pokok kepada masyarakat². Banyak perusahaan ataupun instansi sektor publik yang tujuan utamanya memberikan pelayanan ataupun memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan dari kebutuhannya yang merupakan salah satu dari program-program pemerintah kepada warganya.

¹Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia, “Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020,” 2020.

²Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018). Hlm.8.

Pengukuran kinerja merupakan faktor penting di dalam suatu organisasi, termasuk juga untuk organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan³.

Salah satu pengukuran kinerja yang dapat memberikan tiga maksud tersebut yaitu dengan *Value For Money*. *Value For Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintahan. Kinerja pemerintahan tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output* dan *outcome* secara bersama-sama⁴. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan kepada masyarakat. Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomis, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas publik seperti yang diinginkan oleh masyarakat serta memang

³Indrayani Khairunnisa, "Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016)," *Dalam Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 6 No.1 (2018). Hlm.2.

⁴Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 2018. Hlm. 121.

merupakan tujuan dasar dari sektor publik yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Value for Money yang di dukung oleh konsep ekonomi, efesien, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut dapat menghasilkan *output* yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran/pengelolaan organisasi tersebut untuk mencapai kepentingan *public*.⁵

Dengan demikian, sumber daya manusia harus selalu mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal khususnya pada sektor publik. Hal tersebut tidak terelakkan bahwa perubahan lingkungan organisasi yang kompleks dan dinamis ini akan mempengaruhi kemampuan dan kinerja organisasi untuk berkompetensi dan mempertahankan daya saingnya tanpa terkecuali organisasi pemerintahan. Oleh karena itu, organisasi pemerintahan dituntut untuk terus melakukan perubahan-perubahan yang nantinya mampu meningkatkan kinerja organisasinya. Organisasi atau instansi dalam melaksanakan kinerja selalu diarahkan untuk mencapai tujuannya⁶.

⁵Risa Dwi Agustin, "Konsep Value for Money Dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Sektor Publik," *Dalam Jurnal Ilmu Riset Dan Akuntansi* 6 No.6 (2017). Hlm, 3.

⁶Stephen P. Robbin /mary coulter, *Manajemen* (Indonesia: PT. Macanalaya Cemerlang, 2019). Hlm . 178.

Untuk mampu melaksanakan pertanggungjawaban tersebut sektor publik harus mampu mempersiapkan diri. Persiapan diri tersebut adalah dengan adanya pengambil keputusan yang dilakukan manajer dengan memiliki toleransi rendah terhadap ambiguitas rendah dan bersikap rasional dalam cara berpikirnya efisien dan logis dalam pengambilan keputusan. Serta mempersiapkan sumber daya yang baik sumber daya manusia maupun dari sumber daya yang lain yang dapat memberikan ataupun memudahkan pelayanan yang diberikan serta tercapainya hasil dan sasaran dari tujuan sebenarnya. Sumber daya manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan karena sumber daya manusia berperan dalam pelaksanaan keberhasilan pembangunan Nasional terutama dalam mewujudkan cita-cita Bangsa dan Negara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kinerja yang baik secara langsung akan mempengaruhi kinerja organisasi dan untuk memperbaiki kinerja organisasi tentu merupakan suatu pekerjaan yang memakan waktu dan proses yang panjang⁷. Selain dengan meningkatkan pengawasan dan pembinaan juga dilakukan penilaian terhadap tingkat keberhasilan kinerja yang telah dilakukan oleh para karyawan.

Menurut R. Wayne Mondy Kinerja adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. Bagi banyak organisasi, tujuan utama sistem

⁷Stephen P. Robbin /mary coulter, *Manajemen* (Indonesia: PT. Macanalaya Cemerlang, 2019). Hlm . 178.

penilaian adalah untuk memperbaiki kinerja individu dan organisasi. Sebab mereka dituntut dalam suatu rencana yang efektif untuk mengembangkan dari rencana yang dibentuk yang setiap waktu mengalami peningkatan dan perkembangan yang lebih baik selain itu kinerja juga dikatakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi.

Sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan dalam hal ini organisasi ini merupakan organisasi publik yang kegiatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tujuan akhirnya untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat ataupun kesejahteraan kepada masyarakat dengan memberikan program-program yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tujuan supaya terpenuhinya kebutuhan materi, spritual, dan sosial supaya hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya ditengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks dengan perkembangan jam yang bersipat material sesuai dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Kesejahteraan Sosial yang telah disinggung pada paragraf sebelumnya maka amanat tersebut diberikan kepada. Dinas Sosial fungsinya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan memberikan program-program. Dinas Sosial pada dasarnya belum dapat direalisasikan hal ini bisa dilihat dari angka kemiskinan yang terus meningkat Seperti terlihat dalam tabel. Tingkat kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal.

Tabel I.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Pada Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah(ribu jiwa)	48,30	42,39	40,64	41,31	43,24
Persentase	11,02%	9,58%	9,11%	9,18%	9,49%

Sumber: *Sumber Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)*⁸

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kemiskinan tertinggi pada 2017 dengan persentase 11,02% atau sebanyak 48,30 ribu jiwa dan menurun pada tahun 2018 menjadi 9,58% atau sebanyak 42,39 dan menurun normal angka kemiskinan sebesar 40,64 ribu jiwa pada tahun 2019, dan menjadi bertambah sebesar 41,31 ribu jiwa pada tahun 2020 dan bertambah lagi pada tahun 2021 menjadi 43,24 jiwa.

Gambar I.1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten
Mandailing Natal Tahun 2017-2021
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Mandailing Natal (Ribuan),
2017-2021



Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal*

⁸Badan Pusat statistik, “Persentase Penduduk Miskin Mandailing Natal” (Badan pusat Statistik kabupaten Mandailing natal, 2021).

Dari data tersebut membuktikan bahwa Pemerintah belum mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan diberikannya mandat kepada Dinas Sosial. Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang pemberdayaan fakir miskin yang bernama Bapak Deddi Armansyah, bahwa masyarakat yang termasuk belum sejahtera adalah fakir miskin yang tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, korban bencana alam yang mengakitatnya terganggunya aktivitas-aktivitas mereka dalam melakukan pekerjaan⁹.

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara keuangan Dinas Sosial yang bernama Bapak Riski Halomoan, bahwa meningkatnya tingkat kemiskinan di tahun 2020 dari tahun sebelumnya 2018-2019 sudah normal diakibatkan karena anggaran turun pada tahun 2020 sebesar 75% akibat refocusing penanganan covid-19. Anggaran yang tidak normal, mengakibatkan jumlah kemiskinan yang meningkat daari 2019-2021¹⁰.

Fenomena ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial masih kurang efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, jadi untuk mengetahui dari fenomena-fenomena yang terjadi maka perlu dilihat kinerja dinas sosial dengan melihat realisasi anggaran-anggaran dalam memberikan program. Maka diperlukan alat yang mampu mengukur program kegiatan Dinas Sosial dengan cara menganalisis kinerja keuangan pada kegiatan dinas sosial dari laporan

⁹Deddi Armansyah, Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas sosial, wawancara, 27 juli Pukul 11.00 WIB.

¹⁰Riski halomoan, Bendahara Keuangan Dinas Sosial, Wawancara, 27 juli Pukul 15.00 WIB.

realisasi anggaran tahun 2018-2021. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengangkat judul penelitian “**Analisis Konsep *Value for Money* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal**”

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang diteliti berdasarkan latar belakang penelitian adalah berdasarkan fenomena yang terjadi diduga bahwa program-program Dinas Sosial yang dibuat tersebut harus memang benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat oleh sebab itu diperlukan kinerja yang baik untuk mewujudkan hal tersebut. Jadi berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Peningkatan jumlah kemiskinan yang bertambah pada tahun 2019-2021 dari tahun sebelumnya.
2. Realisasi anggaran yang masih kurang efektif.
3. Kepuasan masyarakat terhadap program-program Dinas Sosial.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas maka peneliti membatasi penelitiannya hanya berkaitan dengan Analisis Kinerja Keuangan Pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal Dengan Menggunakan Konsep *Value For Money* dari tahun 2019-2021. Banyak cara yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu organisasi pemerintah, dalam penelitian ini hanya

membahas tiga poin saja, yaitu mengenai Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya, Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya, di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal telah berjalan secara ekonomis, efisiensi, dan efektivitas jika diukur dengan konsep *Value For Money* ?
2. Apakah Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal telah berjalan secara ekonomis, efisiensi, dan efektivitas jika diukur dengan konsep *Value For Money*?
3. Apakah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal telah secara ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, jika diukur dengan konsep *Value For Money*?

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka diperlukan penjabaran maksud istilah dalam judul. Adapun penjelasan judul ini sebagai berikut:

1. Kinerja adalah sebuah proses menentukan keberhasilan suatu sistem dalam mencapai tujuan melalui monitoring dan pelaporan penyempurnaan

program, terutama peningkatan hasil dari tujuan yang ditentukan sebelumnya.

2. Value For Money adalah tolak ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi, baik organisasi yang berorientasi laba (swasta) maupun organisasi *nonprofit* (sektor publik) adalah Menurut Mardiasmo *Value For Money* yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, adalah:
 - a. Ekonomi suatu pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input-input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
 - b. Efisiensi pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. efisiensi merupakan perbandingan *output input* yang dikaitk komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya an dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
 - c. Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil-hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.¹¹

¹¹Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018).

Berdasarkan istilah di atas, penulis menerangkan bahwa maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal pada program-programnya apakah sudah sesuai dari konsep *Value For Money* apabila dianalisis.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal khususnya terhadap program kinerja yaitu:

1. Untuk mengetahui kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal dalam program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, jika diukur dengan konsep *Value For Money* yaitu dilihat dari segi ekonomi, efisiensi dan efektivitas.
2. Untuk mengetahui kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal dalam program perlindungan dan jaminan sosial, jika diukur dengan konsep *Value For Money* dilihat dari segi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
3. Untuk mengetahui kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal dalam program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, jika diukur dengan konsep *Value For Money* dilihat dari segi ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

G. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat yang berarti yaitu :

1. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dalam bidang penatausahaan keuangan.
2. Bagi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Mandailing Natal khususnya Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran di dalam sistem keuangan daerah serta implementasi penatausahaan keuangan daerah.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat dengan tujuan untuk mempermudah penulisan dalam menyusun skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan yang dibuat yaitu:

Bab I Pendahuluan berisi mengenai dasar disebabkan dilakukan penelitian dilokasi yang telah ditentukan dan dijelaskan dibagian latar belakang masalah, serta didukung dengan bagian lainnya seperti identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori berisi mengenai penjelasan judul yang akan diteliti sesuai dengan teori.

Bab III Metode Penelitian berisi bagian bagian yang berisi mengenai hasil yang berisi tentang metode yang akan ditentukan peneliti dalam memperoleh data penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi mengenai hasil penelitian atas hubungan program-program Dinas Sosial apakah ekonomis, efisien dan efektifitas apabila di ukur dengan menggunakan konsep *Value For Money*.

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan, keterbatasan peneliti, kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Kinerja

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi, yang dilakukan saat visi dan misi adalah setiap pelaksana dari visi dan misi dengan cara memberikan informasi latar belakang kepada pelaksana yang dibutuhkan untuk melakukan mereka secara memuaskan dan sesuai dari keinginan dari kebutuhan yang diinginkan dari organisasi.¹² Secara umum kinerja merupakan prestasi yang ingin dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Pengukuran kinerja sektor publik bukan hanya bagaimana kemampuan uang publik dibelanjakan, tetapi dilihat juga dari segi ekonomis, efisien, dan efektivitas, dan tentunya dari segi *outcome*. Pengukuran kinerja sektor publik dilaksanakan untuk menilai pencapaian organisasi melalui alat ukur keuangan dan nonkeuangan.¹³

Pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa

¹²Gary dessler, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT. Intan Sejati Klaten, 2013). Hlm. 278.

¹³Abdul halim Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2019). Hlm. 142.

produk, jasa, ataupun suatu proses. Kinerja akan tercapai apabila seorang manyakini dan percaya dan hasil kerja dari yang di kerjakan tidak hanya beranggapan bahwa semuanya sudah ditentukan namun kalau tidak bekerja dengan baik dan benar maka hasilnya tidak baik oleh sebab itu seorang muslim juga harus beranggapan bahwa selain allah sebagai penentu ia juga dapat memberikan keseriusanpada dirinya maka dari keyakinan ini akan menjadi orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan agar mendapat hasil yang maksimal.

Al-Qur'an juga menekankan bahwa setiap apa yang dikerjakan akan mendapatkan apa yang diperbuat dari prestasi dan pelaksanaan kerja. Hal ini diterangkan dalam Surah An-Najm Ayat 39: sebagai berikut

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩

Artinya:“dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”¹⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya apa yang sudah dikerjakan tiap-tiap orang maka merupakan hasil dari kinerjanya dan hasil kinerja itu tidak dapat diberikan atau kita alihkan kepada orang lain, jadi apabila memang terjadi kinerja yang tidak bagus atau hasilnya tidak sesuai dari tujuan organisasi sektor publik maka kesalahan itu bukan disebabkan oleh

¹⁴Al-fatih, Al-qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab, AN-Najm Ayat 39, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka,2020). Hlm. 527.

orang lain namun itu dari hasil kinerja, oleh sebab itu jika menginginkan sesuatu yang lebih dari alam ini maka tergantung pada usaha. Semakin sungguh-sungguh bekerja dan berusaha semakin banyak harta atau laba yang akan diperolehnya. Prinsip tersebut semakin memperjelas bahwa semakin manusia bersungguh-sungguh bekerja untuk memperbaiki kinerja instansi maka hasil yang diperoleh adalah maksimal. Hal ini dapat dinilai dari kinerja keuangan pada kegiatan Dinas Sosial Mandailing Natal.

2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan.¹⁵ Adapun pertimbangan tersebut yaitu untuk tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*).

- a. Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.
- b. Indikator keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik

¹⁵Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018).

- c. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

Dengan demikian penerapan indikator kinerja membutuhkan artikulasi misi, tujuan, sasaran dan hasil program yang bisa diukur dan memiliki kejelasan akan manfaatnya. Tujuan dan sasaran biasanya ditetapkan menurut hasil atau *outcome* dari setiap program yang dilaksanakan. Manfaat skema indikator kinerja dapat dipertimbangkan menjadi lima macam:

- a) Kejelasan tujuan organisasi.
- b) Mengembangkan persetujuan pengukuran aktifitas.
- c) Keuntungan proses produksi harus dipahami lebih jelas.
- d) Tersediaanya perbandingan kinerja dari organisasi yang berbeda
- e) Tersediaanya fasilitas *setting of target* untuk penilaian organisasi dan individual manager sebagai bagian dari pertanggungjawaban organisasi.

3. Pengukuran Kinerja

Setelah dilakukannya operasionalisasi anggaran maka yang akan dilakukan kemudian adalah pengukuran kinerja dimana untuk menilai prestasi yang telah dicapai dalam unit organisasi yang dipimpin. Menurut Mardiasmo tujuan pengukuran kinerja adalah “pengukuran kinerja sangat

penting untuk menilai akuntabilitas organisasi tersebut.¹⁶ Prestasi kerja sebagai suatu sistem yang bersifat formal yang dilakukan secara periodik untuk mereview dan mengevaluasi kinerja pegawai. Penilaian prestasi kerja adalah suatu cara dalam melakukan evaluasi terhadap prestasi kerja pegawai dengan serangkaian tolok ukur tertentu yang obyektif dan berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta dilakukan secara berkala. Penilaian untuk kerja adalah uraian sistematis tentang kekuatan/kelebihan dan kelemahan yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang atau sebuah kelompok. Manfaat pengukuran kinerja :

- a) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilaikinerja manajemen.
- b) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- c) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja danmembandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan kolektifuntuk memperbaiki kinerja.
- d) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward andpunishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuaidengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- e) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangkamemperbaiki kinerja organisasi.

¹⁶Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2019). Hlm 130.

- f) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- g) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- h) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah, dan
- i) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Islam juga memandang kinerja terhadap apa yang dikerjakan dimana Agama Islam yang berdasarkan *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits* sebagai tuntunan dan pegangan bagi kaum Muslim mempunyai fungsi tidak hanya mengatur dalam segi ibadah saja melainkan juga mengatur umat dalam memberikan tuntutan dalam masalah yang berkenaan dengan muamalatnya. Dimana Islam mengajarkan kepada umat nabi Muhammad SAW untuk bekerja sesuai dengan syariat atau dibenarkan menurut syarak untuk menjamin kebaikan bersama dengan menjauhi dari bekerja yang bersipat materialistis yang hanya mengejar dunia tanpa memikirkan akhirat. Pekerjaan yang diiringi dengan yang dibenarkan syariat akan mendapatkan dari kinerja yang baik sebab Allah menilai dari pekerjaan dari setiap yang dilakukan hambanya sesuai dengan firman Allah dalam suroh *At-Tauwbah* ayat 105.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

Artinya: dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."¹⁷

Dari tafsir ayat tersebut dapat disimpulkan Allah menegaskan bahwa hambanya diperintahkan untuk bekerja namun dalam bekerja seorang hamba haruslah bekerja dengan baik serta merupakan bentuk amal yang dikerjakan sesuai dari syariat sebab pekerjaan yang dikerjakan seseorang dengan baik maka Allah akan membalas amal tersebut sesuai dengan apa yang dikerjakannya.

Karena setiap tindakan akan terlihat oleh Allah, Rasul dan orang mukmin, jadi seorang hamba haruslah selalu merasa diawasi dan menumbuhkan perasaan takut kepada Allah sebab kalau seorang hamba menumbuhkan rasa takut kepada Allah maka akan timbul perasaan selalu merasa diawasi dari setiap pekerjaan yang dilakukan, sebab Allah mengetahui dari yang nyata hingga yang ghaib jadi seorang hamba tidak akan dapat bersembunyi untuk melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dari syariat, karena kinerja akan terlihat sesuai dari yang dikerjakan sesuai ketentuan Allah dari ayat tersebut oleh sebab itu pekerjaan sangat perlu untuk di evaluasi untuk

¹⁷Al-fatih, Al-qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab, At-Taubah Ayat 105, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2020). Hlm. 203.

mengetui hasil dari kinerja hal ini dapat dilakukan oleh orang pribadi maupun instansi dan sebagai bahan dari untuk peningkatan kinerja yang baik.

B. Konsep *Value For Money*

1. Pengertian Konsep *Value For Money*

Value for money adalah istilah yang digunakan untuk menilai apakah organisasi telah memperoleh manfaat maksimal dari barang dan jasa yang baik memperoleh manfaat maksimal dari barang dan jasa yang baik memperoleh dan memberikan, dalam sumber daya yang tersedia.¹⁸

Tolak ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi, baik organisasi yang berorientasi laba (swasta) maupun organisasi nonprofit (sektor publik) adalah *Value For Money* yang meliputi penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomi. Dimana pengertian dari masing-masing elemen tersebut adalah:

- a. Ekonomis adalah pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

¹⁸Jumaina Septariani, "Penerapan Konsep Value for Money Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Good Government Government (Tata Kelola Pemerintah Yang Baik) Pada Kabupaten Musi Banyuasin," *Jurnal Penerapan Konsep Value for Money*, 2016. Hlm. 160.

- b. Efisiensi adalah hubungan antara *input* dan *output* dimana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai output tertentu. Atau dengan kata lain efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efisiensi merupakan hal terpenting di antara ketiga hal tersebut. Suatu organisasi dirasa semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung di atas satu. Semakin besar angkanya, semakin tinggi tingkat efisiensinya. Secara mutlak, rasio ini tidak menunjukkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Namun, berbagai program di dua perusahaan dalam industri yang sama, dapat diperbandingkan tingkat efisiensinya. Apabila rasionya lebih besar dari satu dan dibandingkan dengan hasil rasio program yang sama di perusahaan lain, maka program tersebut bisa disebut lebih efisien.
- c. Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara sederhana, merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Dalam rangka mencapai tujuan, organisasi sektor publik seringkali kali tidak memperhatikan biaya yang dikeluarkan. Hal seperti ini bisa terjadi apabila efisiensi biaya bukan merupakan bagian dari indikator hasil.

Dapat disimpulkan bahwa tiga indikator prestasi organisasi sektor publik dirinci sebagai ekonomi itu mengenai input, *efisien* tentang *input* dan *output*, dan efektifitas berhubungan dengan *output* dan *outcome*. Mekanisme untuk menentukan indikator kinerja memerlukan hal – hal sebagai berikut :

- 1) Sistem perencanaan dan pengendalian
- 2) Spesifikasi teknis dan standarisasi
- 3) Kompetensi teknis dan profesionalisme
- 4) Mekanisme ekonomi
- 5) Mekanisme sumber daya manusia

2. Pengukuran Konsep *Value For Money*

Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.¹⁹

Agar dalam menilai kinerja organisasi dapat dilakukan secara objektif, maka diperlukan indikator kinerja. Indikator kinerja yang ideal harus terkait

¹⁹Haryanto dkk, *Akuntansi Sektor Publik* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2019).

pada efisiensi biaya dan kualitas pelayanan. Sementara itu, kualitas terkait dengan kesesuaian dengan maksud dan tujuan, konsistensi, dan kepuasan publik kepuasan dalam masyarakat dalam konteks tersebut dapat dikaitkan dengan semakin rendahnya *complaint* dari masyarakat.

C. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah orang atau organisasi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bekerja melayani kepentingan orang banyak atau masyarakat umum. Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

- a. kelompok pelayanan barang,
- b. kelompok pelayanan administrasi, dan
- c. kelompok pelayanan jasa.

Upaya pemerintah mengarahkan bimbingan dalam pelayanan publik :

- 1) Mengatur sarana bagi penguasa untuk mengurus dan mengendalikannya.
- 2) Mengatur cara partisipasi
- 3) Mengatur tentang perlindungan hukum.

Selanjutnya tujuan yang menyediakan sejumlah layanan sebagai hakikat dari tanggungjawab Pemerintah untuk mendorong pencapaian transportasi menyelenggarakan pelayanan publik yang berkesinambungan, berkualitas cepat, mudah terjangkau dapat terukur diperlukan standar pelayanan secara yuridis normatif.

D. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa referensi yang telah ada dan berkaitan dengan judul yang akan penulis angkat antara lain:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Zhalsha Ramadhani Nur Hidayat (2021)	Pengukuran kinerja program bantuan sosial covid-19 dengan menggunakan indikator value for money pada pemerintah kota Makassar. ²⁰	Hasil penelitian menunjukkan kinerja program Bansos <i>Covid-19</i> mampu menerapkan konsep ekonomi dan efisien namun tidak mampu mengoptimalkan efektivitas kinerjanya. Selain itu Pemerintah kota Makassar belum bertindak transparan, akuntabel, dan mementingkan kepentingan public, yang dimana berdampak kepada kinerja yang kurang baik.

²⁰Zhalsha Ramadhani Nur Hidayat, "Pengukuran Kinerja Program Bantuan Sosial *Covid-19* Dengan Menggunakan Indikator Value for Money Pada Pemerintahan Kota Makassar" (Skripsi, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2021).

2	Debby Tamara Enre (2020)	Analisis <i>Value For Money</i> Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan. ²¹	Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan berdasarkan rasio <i>Value For Money</i> tergolong belum baik, karena realisasi program yang diukur dari tingkat rasio <i>Value For Money</i> selama tahun 2014-2018 mengalami penurunan setiap tahunnya .
3	Indrayani Khairunnisa (2018)	Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep <i>Value For Money</i> Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode (2014-2016)). ²²	Hasil ini menunjukkan bahwa rasio ekonomi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe bernilai ekonomis, sehingga untuk indikator rasio ekonomis Pemerintah Kota Lhokseumawe sudah mencapai kinerja yang baik, karena telah berhasil mengelolah anggaran belanja dengan baik.
4	Sayuti Jamalluddin (2018)	Perwujudan nilai transparansi, Akuntabilitas dan Konsep <i>Value For Money</i> dalam Pengelolaan Akuntansi keuangan Sektor public.(studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan). ²³	Hasil penelitian ini di peroleh bahwa perwujudan nilai transparansi sudah diterapkan dengan adanya keterbukaan informasi dan proses nilai akuntabilitas pertanggungjawaban terhadap public dan pemerintah sesuai dengan aturan, dalam prosese pengelolaan keuangan akuntansi dengan

²¹Debby tamara Enre, “Analisis Value for Money Anggaran Pendapatan Pada Kota Medan” (Skripsi, Medan, Universitas Islam Negri Sumatera Utara, 2020).

²²Indrayani khairunnisa, “Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value for Money Pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016,” *Dalam Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 6 no.1 (2018).

²³Sayuti jamalluddin, “Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas Dan Konsep Valur for Money Dalam Penngelolan Akuntansi Keuangan Sektor Publik(Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan),” *Dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1.no.1 (2018).

			menggunakan sistem yang berbasis akrual, konsep <i>value for money</i> cukup ekonomis, efisien dan efektif di badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
5	Risa Dwi Agustin (2017)	Konsep <i>Value For Money</i> Dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Sektor Publik. ²⁴	Hasil penelitian ini menunjukkan Dinas Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dapat dikatakan ekonomis, dilihat dari penyediaan barang dan jasa perkantoran dimana dana anggaran yang diserap untuk menjalankan suatu program, kegiatan, dan kebijakan sebesar 91,6%.
6	Nova Kurniawati Vidya Vitta Adhivinna (2017).	Analisis Penerapan Konsep <i>Value For Money</i> Pada Pemerintah Kabupaten Bantul. ²⁵	Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Bantul dikatakan sangat efektif dari tahun 2010-2013, meskipun rasio efektif menunjukkan bahwa setiap tahunnya menurun namun realisasi

²⁴Risa Dwi Agustin, "Konsep *Value for Money* Dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Sektor Publik", vol. 6 no.6 (dalam jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 2017).

²⁵Nova Kurniawati dan Vidya Vitta Adhivinna, "Analisis Penerapan Konsep *Value for Money* Pada Pemerintah Kabupaten Bantul," *Dalam Jurnal Analisis Penerapan Konsep Value for Money Pada Pemerintah*, 2017.

P			pendapatan PAD terus meningkat dari tahun 2010-2013.
E P	7 Jumaina Septiani (2016)	Penerapan Konsep <i>Value For Money</i> Pada Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan <i>Good Government Governance</i> (Tata Kelola Pemerintah Yang Baik) Pada Kabupaten Musi Banyuasin. ²⁶	Penerapan konsep <i>value for money</i> pada Kabupaten Musi Banyuasin sudah ekonomis,efesien, dan efektif. Secara rasio ekonomis sudah ekonomis hal ini ditandai dengan jumlah realisasi pendapatan sudah melebihi anggaran pendapatan dikarenakan meningkatnya PAD dan Dana pertimbangan yang diterima dari pusat.

erbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Debby Tamara Enre adalah Debby Tamara Enre meneliti tentang Analisis *Value Fo Money* Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan. Persamaannya

²⁶Jumaina Septariani, "Penerapan Konsep Value for Money pada Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Good Government (Tata Kelola Pemerintah Yang Baik) Pada Kabupaten Banyuasin," *Dalam Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2016.

adalah sama-sama melakukan penelitian tentang analisis konsep *value for money* dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.

2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Indrayani Khairunnisa adalah Indrayani Khairunnisa meneliti tentang Kinerja Dengan Menggunakan Konsep *Value For Money* Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode (2014-2016). Persamaan penelitian ini dengan penelitian Indrayani Khairunnisa adalah sama-sama melakukan penelitian tentang analisis konsep *value for money* serta menggunakan jenis sumber data yang sama yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.
3. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Jumaina Septariani adalah Jumaina Septariani meneliti Perapan Konsep *Value For Money* Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan *Good Government Governance* (Tata Kelola Pemerintah Yang Baik) Pada Kabupaten Musi Banyuasin. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Jumaina Septariani adalah sama- sama meneliti tentang analisis konsep *value for money*.
4. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nova Kurniawati, vidya Vitta Adhivinna adalah Nova Kurniawati, vidya Vitta Adhivinna meneliti Analisis Penerapan Konsep *Value For Money* Pada Pemeintah Kabupaten Bantul. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nova Kurniawati,

vidya Vitta Adhivinna adalah sama- sama meneliti tentang analisis konsep *value for money*.

5. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Risa Dwi Agustin adalah Risa Dwi Agustin meneliti Konsep *Value For Money* Dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Sektor Publik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Risa Dwi Agustin adalah sama- sama meneliti tentang analisis konsep *value for money*.
6. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Zhalsha Ramadhani Nur Hidayat adalah Zhalsha Ramadhani Nur Hidayat meneliti Pengukuran kinerja program bantuan sosial covid-19 dengan menggunakan indikator *value for money* pada pemerintah kot Makkasar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Zhalsha Ramadhani Nur Hidayat adalah sama- sama meneliti tentang analisis konsep *value for money*.
7. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sayuti Jamalluddin adalah Sayuti Jamalluddin meneliti Perwujudan nilai transparansi, Akuntabilitas dan Konsep *Value For Money* dalam Pengelolaan Akuntansi keuangan Sektor publik (studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan). Persamaan penelitian ini dengan penelitian Sayuti Jamalluddin adalah sama- sama meneliti tentang analisis konsep *value for money*.

E. Kerangka Pikir

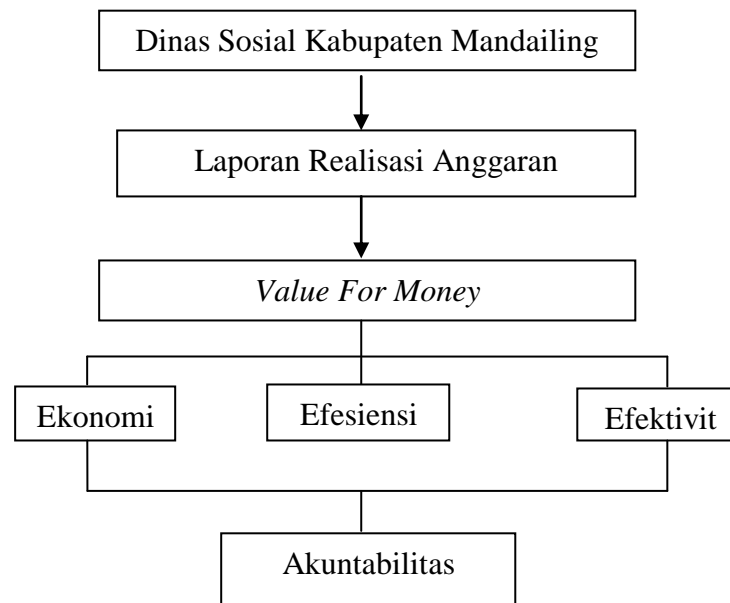
Organisasi sektor publik memerlukan adanya pengukuran kinerja untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi. Pengukuran kinerja pada organisasi-organisasi sektor publik tidak hanya berdasarkan pada ukuran financial saja tetapi juga pada ukuran *nonfinancial* karena tujuan utama organisasi ini bukan memperoleh laba melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kinerja organisasi sektor publik yang bersifat multidimensional menyebabkan tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja. Selain itu, *output* yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik umumnya bersifat *intangible*, sehingga perlu adanya ukuran non-finansial yang dapat mencerminkan besarnya *output* yang dihasilkan.

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity and service coverage*). Tujuan *value for money* adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan memperbaiki kinerja pemerintah.²⁷

²⁷Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2020).

Untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas, adapun kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan pada gambar berikut ini :

Gambar I.1 Kerangka pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan mengidentifikasi objek sesuai dengan apa yang ada. Tujuan kualitatif deskriptif ini adalah membantu pembaca untuk mengetahui apa yang terjadi dilingkungan dibawah pengamatan, seperti apa kinerja yang berada di latar belakang penelitian, dan seperti apa peristiwa yang terjadi di latar belakang penelitian.²⁸

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan data-data informasi berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti akan menggambarkan yang cukup jelas dan objek yang diteliti dengan analisis *Value For Money*.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Mandailing Natal, yang beralamat di Jl. Willem Iskandar No. 11 Dalam Lidang,

54. ²⁸Elidawaty Purba, dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm.

Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara. Lokasi penelitian tersebut merupakan lokasi yang bertepatan dengan tempatmagang, sehingga penulis merasa terpanggil dan memiliki keinginan kuat untukmeneliti lebih dekat mengenai kinerja keuangan pada kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini adalah dimulai dari bulan Juli 2022 sampai dengan selesai.

C. Subjek dan Objek

1. Subjek

Subjek adalah target populasi yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta di lapangan. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang penanganan fakir miskin (Dedi Armansyah), Kepala bidang rehabilitas (Muhammad Ali), dan Bendahara keuangan (Riski halomoan).

2. Objek

Objek Penelitian himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang diteliti. Objek penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai untuk mendapatkan jawaban atau solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek pada penelitian ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang di dapat secara langsung dari sumber asli tanpa perantara. Data primer merupakan sumber utama untuk memperoleh jawaban atas penelitian yang diajukan dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang bersumber dari data laporan yang sudah ada.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.²⁹Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung, wawancara, dan studi dokumentasi. Untuk

²⁹Arfa Ikhsan dan Imam Ghazali, *Metode Penelitian Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, (Medan: PT. Madju Medan Cipta, Cet Ke-1, 2006), hlm.106

mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab atau wawancara langsung dengan bagian-bagian yang berwenang dan pegawai yang terlibat didalam perusahaan. Dalam penelitian ini, yang ingin diwawancarai terdiri dari 3 orang yaitu Kepala Bidang Pemberdayaa Fakir miskin (Deddi Armansyah), Kepala Bidang Rehabilitasi (Muhammad Ali), Bendahara Keuangan (Riski Halomoan).
2. Teknik Dokumentasi, merupakan metode mencari data yang bersumber pada tulisan sehubungan dengan masalah penelitian (pengumpulan data sekunder yang berupa catatan, buku, pedoman, surat kabar, agenda, rapat dan lain-lain)³⁰ yaitu serangkaian informasi dan dokumen yang berupa laporan realisasi anggaran kegiatan dinas sosial kabupaten Mandailing Natal.

E. Teknik Analisis data

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analysis interactive* langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu, sebagai berikut:

³⁰Lailatus sa'adah, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (Jombang: Universitas KH. A Wahab hasbullah, 2021).

Dalam hal ini, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode rasio dengan membandingkan hasil dari perhitungan rasio terhadap laporan realisasi anggaran kegiatan Dinas Sosial. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan *Value For Money* dengan menggunakan tiga elemen yaitu:

1. Pengukuran Ekonomi

Pengukuran ekonomi berkaitan dengan pemerolehan *input* dengan kualitas tertentu dengan harga terendah. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan anggaran yang telah disetujui. Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan ekonomis adalah apabila dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.³¹

$$\text{Rasio ekonomi} = \frac{\% \text{Input}}{\% \text{Biaya Input}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian:

Tabel III.1
Persentase Penilaian Ekonomi

No	Persentase	Penilaian
1	90-100	Sangat ekonomis
2	80-89.99	Ekonomis
3	70-79.99	Cukup Ekonomis
4	60-69.99	Kurang Ekonomis
5	<59,99	Tidak ekonomis

Sumber : Kepmendagri No.600.900-327 Tahun 2019

2. Pengukuran Efisiensi

³¹Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.89.

Efisiensi adalah hubungan antara *input* dan *output* dimana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan rasio antara *output* dan *input*. Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan efisien adalah apabila mencapai *output* yang optimum.³²

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\% \text{Output}}{\% \text{Input}} \times 100\%$$

Dimana hasil dari *output* merupakan persentase perhitungan realisasi fisik dilapangan dari setiap kegiatan yang ada, sedangkan nilai *input* merupakan persentase antara dana yang digunakan dengan yang dianggarkan dari anggaran pendapatan.

Hasil perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian:

Tabel III.2
Persentase Penilaian Efisiensi

No	Persentase	Penilaian
1	90-100	Sangat efisiensi
2	80-89.99	Efisiensi
3	70-79.99	Cukup efisiensi
4	60-69.99	Kurang efisiensi
5	<59,99	Tidak efisiensi

Sumber : Kepmendagri No.600.900-327 Tahun 2019

3. Pengukuran Efektivitas

³²Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia,2011), hlm.89.

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³³ Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan efektif adalah apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka dikatakan efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat organisasi, telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\% \text{ Outcome}}{\% \text{ Output}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian:

Tabel III.3
Persentase Penilaian Efektivitas

No	Persentase	Penilaian
1	90-100	Sangat efektivitas
2	80-89.99	Efektivitas
3	70-79.99	Cukup efektivitas
4	60-69.99	Kurang efektivitas
5	<59,99	Tidak efektivitas

Sumber : Kepmendagri No.600.900-327 Tahun 2019

Langkah-langkah yang dibuat penulis dalam teknik analisis data ini adalah :

³³Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 2009. Hlm.134.

1. *Collecting*/Pengumpulan data, berkaitan dengan laporan realisasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal yang diperoleh dari hasil observasi.
2. Reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada laporan realisasi anggaran kegiatan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal. Terlebih dahulu peneliti mengklarifikasi data realisasi dan anggaran yang telah diperoleh, kemudian mengolah serta menghubungkan semua data yang telah diperoleh dengan teori yang ada. Pengukuran kinerja keuangan ditinjau menggunakan metode *value for money* dengan menghitung rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas anggaran dengan menggunakan data yang diperoleh.
3. Penyajian data, sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berupa analisis dalam bentuk uraian singkat, sehingga peneliti dapat menguasai data. Penyajian data ini dilakukan dengan evaluasi kinerja keuangan berdasarkan laporan realisasi dan anggaran yang telah dianalisis.
4. Penarikan kesimpulan, melakukan simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai *Value for Money* dalam pengukuran kinerja keuangan.

F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menguji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi. Biasanya teknik triangulasi merujuk pada suatu proses pemanfaatan persepsi atau pendapat yang beragam untuk mengklasifikasikan makna. Langkah triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek data atau menguji kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan cara :

1. Triangulasi yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut.
2. Triangulasi sumber yaitu mengkaji data, hal ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Sosial

1. Sejarah Singkat

Kantor dinas sosial Mandailing Natal adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal ini berdiri pada tahun 2017 berdasarkan Perbub No. 40 tahun 2016 yang isinya tentang “Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal”. Sebelum tahun 2017, Kantor Dinas Sosial bergabung dengan Dinas Kependudukan, Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

Tugas pokok dari Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal ini membantu Walikota (Bupati) dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial melaksanakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang sosial, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, penyelenggaraan kesekretariatan dinas, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan unit

pelaksana teknis (UPT) dinas, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal

a. Visi Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal

Kesejahteraan Sosial Dari, Oleh, dan Untuk Masyarakat Mandailing Natal.

b. Misi Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal

- 1) Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan partisipasi sosial dan masyarakat, dimana terdapat peran aktif dari masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial secara komprehensif.
- 2) Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan rehabilitasi sosial guna memulihkan ketidakberdayaan masyarakat dalam melaksanakan fungsi sosialnya.
- 3) Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pelayanan sosial, yang mengandung pengertian optimalisasi pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- 4) Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan terhadap pembinaan rawan sosial keluarga dan anak.

3. Lokasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal

Kantor Dinas Sosial Mandailing Natal, yang beralamat di Jl. Willem Iskandar No. 11 Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara.

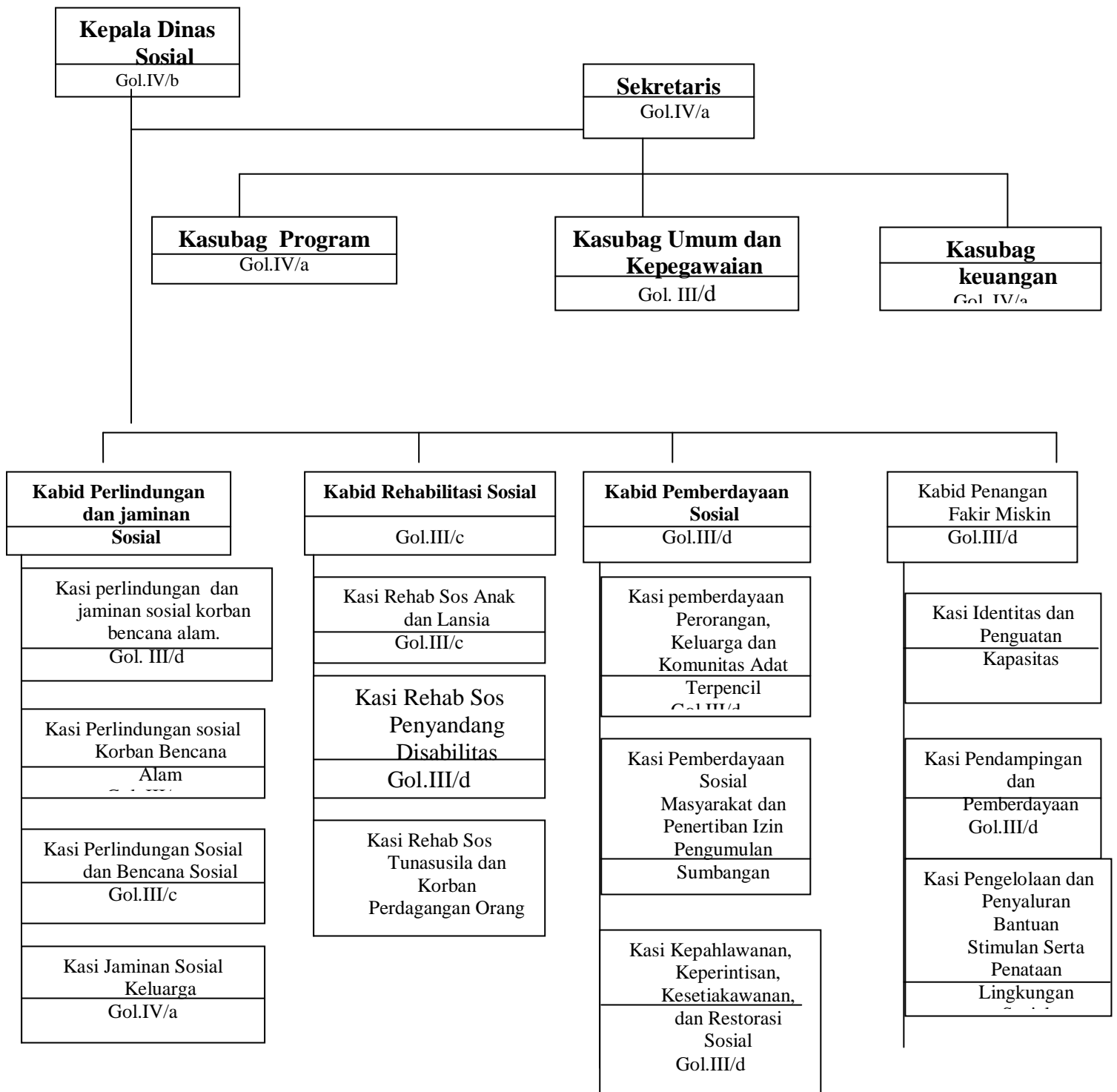
4. Struktur Organisasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal

Setiap instansi baik instansi pemerintah maupun swasta mempunyai struktur organisasi. Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal juga mempunyai struktur organisasi yang sudah ditetapkan. Dalam struktur organisasi ditetapkan tugas –gas wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam mencapai tujuan yang ditetapkan serta bagaimana hubungan satu dengan yang lain. Struktur organisasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

- a) Plt. Kepala Dinas Sosial : Dedi Armansyah S. Sos
- b) Sekretaris Dinas Sosial : Ahmad Rizal Efendi, ST
- c) Kabid Perlindungan & Jaminan Sosial : Ali Asgor, S. Sos
- d) Kabid Rehabilitasi Sosial : Muhammad Ali, S. Sos
- e) Kabid Pemberdayaan Sosial : H. Marhadil Nasution, SP
- f) Kabid Penanganan Fakir Miskin : Dedi Armansyah S. Sos

Gambar IV.1 Struktur Organisasi

Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal Peta Jabatan



B. Pembahasan dan Analisis Penelitian

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Terbangunnya kerjasama kemitraan antara pengusaha dan kelompok usaha fakir miskin, berkembangnya geografi informasi sistem (GIS) bagi petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah sosial dan lainnya. Program-program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

- a) Peningkatan pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin melalui bimbingan motivasi, pelatihan keterampilan usaha dan pemberian modal usaha.
- b) Membangun kerjasama kemitraan antara pengusaha dengan kelompok fakir miskin.
- c) Peningkatan pemberdayaan komunitas adat terpencil secara bertahap, mengembangkan geografi informasi sistem (GIS) bagi pemetaan.
- d) Peningkatan kemampuan (*capacity building*) bagi petugas dan pendamping pemberdayaan sosial fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya.
- e) Peningkatan dukungan administrasi dan operasional.

2. Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi korban bencana alam dan sosial, sehingga dapat memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), terlaksananya bantuan sosial bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah dan terlaksananya sistem jaminan sosial kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah kumuh dan PMKS lainnya, program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

- a) Menyediakan bantuan dasar pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya.
- b) Menyediakan bantuan pemulangan/terminasi bagi korban bencana alam, bencana sosial, pekerja migran bermasalah dan orang terlantar.
- c) Menyediakan bantuan stimulan bahan bangunan rumah bagi korban bencana alam dan bencana sosial.
- d) Memberikan bantuan persiapan bagi daerah penerima pengungsi dan pekerja migran bermasalah.
- e) Memberikan bantuan bagi korban tindak kekerasan melalui usaha ekonomi produktif.
- f) Menyelenggarakan sistem jaminan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah kumuh dan PMKS lainnya.

- g) Melakukan pemantuan berkala dan evaluasi terhadap pemberian bantuan korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya.
- h) Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.

3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial dan memberikan bantuan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para PMKS untuk kelangsungan hidup dan pengembangannya. Program ini juga bertujuan agar terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasana rehabilitasi sosial; terlaksananya pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak serta korban tindak kekerasan, terlaksananya pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak disabilitas, dan anak nakal serta lanjut usia; terlaksananya pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma center dan terlaksananya kampanye, advoksi, komunikasi, informasi, dan edukasi serta konseling mengenai arti eksploitasi perdagangan perempuan dan anak, kekerasan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya. Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

- a) Menyusun kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS
- b) Mengembangkan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang disabilitas lansia.

- c) Meningkatkan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana kesejahteraan sosial bagi PMKS
- d) Meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi.
- e) Melakukan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak disabilitas, anak nakal dalam dan luarpanti.
- f) Memberikan pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma center termasuk korban bencana.
- g) Membentuk pusat informasi penyandang disabilitas dan trauma center.
- h) Melakukan kampanye, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta konseling mengenai anti eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, dan kekerasan secara nasional maupun lokal.
- i) Melakukan komunikasi, informasi, edukasi dan konseling bagi eks penderita kusta, eks napi dan masyarakat.
- j) Melakukan kampanye sosial pencegahan penyalahgunaan napza.
- k) Melakukan pemantauan berkala dan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
- l) Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.

Untuk mengetahui hasil analisis penelitian terhadap kinerja keuangan pada kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal

ini, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode rasio dengan membandingkan hasil dari perhitungan rasio terhadap laporan realisasi anggaran kegiatan Dinas Sosial. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan *Value For Money* dengan menggunakan tiga elemen yaitu:

a) Pengukuran Ekonomi

Pengukuran ekonomi berkaitan dengan pemerolehan *input* dengan kualitas tertentu dengan harga terendah. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan anggaran yang telah disetujui. Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan ekonomis apabila dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.³⁴

$$\text{Rasio ekonomi}^{35} = \frac{\% \text{Input}}{\% \text{Biaya Input}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian:

Tabel IV.1
Persentase Penilaian Ekonomi

No	Persentase	Penilaian
1	90-100	Sangat ekonomis
2	80-89.99	Ekonomis
3	70-79.99	Cukup Ekonomis
4	60-69.99	Kurang Ekonomis
5	<59,99	Tidak ekonomis

Sumber : Kepmendagri No.600.900-327 Tahun 2019

³⁴Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.89.

³⁵Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016), hlm 21.

b) Pengukuran Efisiensi

Efisiensi adalah hubungan antara *input* dan *output* dimana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan rasio antara *output* dan *input*. Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan efisien apabila mencapai *output* yang optimum.³⁶

$$\text{Rasio efisiensi}^{37} = \frac{\% \text{Output}}{\% \text{Input}} \times 100\%$$

Dimana hasil dari *output* merupakan persentase perhitungan realisasi fisik dilapangan dari setiap kegiatan yang ada, sedangkan nilai *input* merupakan persentase antara dana yang digunakan dengan yang dianggarkan dari anggaran pendapatan.

Hasil perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian:

Tabel IV.2
Persentase Penilaian Efisiensi

No	Persentase	Penilaian
1	90-100	Sangat efesiensi
2	80-89.99	Efesiensi
3	70-79.99	Cukup efesiensi
4	60-69.99	Kurang efesiensi
5	<59,99	Tidak efesiensi

Sumber : Kepmendagri No.600.900-327 Tahun 2019

³⁶Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia,2011), hlm.89.

³⁷Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta,2016),hlm 21.

c) Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³⁸ Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan efektif adalah apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka dikatakan efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat organisasi, telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

$$\text{Rasio efektivitas}^{39} = \frac{\% \text{ Outcome}}{\% \text{ Output}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian:

Tabel IV.3
Persentase Penilaian Efektivitas

No	Persentase	Penilaian
1	90-100	Sangat efektivitas
2	80-89.99	Efektivitas
3	70-79.99	Cukup efektivitas
4	60-69.99	Kurang efektivitas
5	<59,99	Tidak efektivitas

C. Hasil Penelitian

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya.

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya adalah

³⁸Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 2009. Hlm.134.

³⁹Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta,2016),hlm 22.

program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keberdayaan sosial keluarga fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Menurut hasil wawancara dengan Bapak kabid Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya, program ini mendapatkan dana setiap tahunnya, dimana dana yang diperoleh pada tahun 2019-2021⁴⁰ adalah sebagai berikut:

Tabel IV.4
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya, Tahun
2019-2021

No	Tahun	Anggaran program (Biaya <i>Input</i>)	Realisasi anggaran
1	2019	290.920.103	235.645.283
2	2020	218.190.077	172.370.160
3	2021	214.381.065	171.504.852

Untuk mengetahui apakah program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektivitas jika diukur dengan konsep *value for money*, maka langkah-langkah pengukuran *vaue for money* pada program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya adalah sebagai berikut:

⁴⁰Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas sosial.

1) Nilai Ekonomi

(a) Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Rasio ekonomi} &= \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\% \\ &= \frac{235.645.283}{290.920.103} \times 100\% \\ &= 81\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio ekonomi} &= \frac{\%Input}{\%Biaya Input} \times 100\% \\ &= \frac{81\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 81\% \end{aligned}$$

Pada hasil perhitungan di atas bahwa program pemberdayaan fakir miskin, komunitas dan adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya pada tahun 2019 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 81%. Berdasarkan persentase penilaian ekonomi kinerja Dinas Sosial dalam program pemberdayaan fakir miskin, komunitas dan adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya masuk dalam kategori ekonomis karena dapat meminimalisir anggarannya dengan baik, dengan cara menghindari pengeluaran yang boros dan pengeluaran yang tidak produktif.

(b) Nilai Ekonomis Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Rasio ekonomi} &= \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\% \\ &= \frac{172.370.160}{218.190.077} \times 100\% \\ &= 79\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio ekonomi} &= \frac{\% \text{Input}}{\% \text{Biaya Input}} \times 100\% \\ &= \frac{79\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 79\% \end{aligned}$$

Pada hasil perhitungan di atas bahwa program pemberdayaan fakir miskin, komunitas dan adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya pada tahun 2020 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 79%. Berdasarkan persentase penilain ekonomi kinerja Dinas Sosial dalam program program pemberdayaan fakir miskin, komunitas dan adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya masuk dalam kategori cukup ekonomis karena dapat meminimalisir anggarannya dengan baik, dengan cara menghindari pengeluaran yang boros dan pengeluaran yang tidak produktif.

(c) Nilai Ekonomis Tahun 2021

$$\text{Rasio ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

$$= \frac{171.370.150}{214.381.065} \times 100\%$$

$$= 80\%$$

$$\text{Rasio ekonomi} = \frac{\%Input}{\%Biaya\ Input} \times 100\%$$

$$= \frac{80\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 80\%$$

Pada hasil perhitungan di atas bahwa program pemberdayaan fakir miskin, komunitas dan adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya pada tahun 2021 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 80%. Berdasarkan persentase penilai ekonomi kinerja Dinas Sosial dalam program pemberdayaan fakir miskin, komunitas dan adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya masuk dalam kategori ekonomis karena dapat meminimalisir anggarannya dengan baik, dengan cara menghindari pengeluaran yang boros dan pengeluaran yang tidak produktif.

2) Nilai Efisiensi

(a) Tahun 2019

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\%Output}{\%Input} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{81\%} \times 100\%$$

$$= 123,45\%$$

Pada hasil perhitungan di atas bahwa program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya pada tahun 2019 dengan kegiatan Peningkatan Kemampuan (*Capacity Building*) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainnya, terlaksananya Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin.

Menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 123,45%. Dimana hasil persentase lebih dari 100% yang berarti bahwa program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Lainnya dapat menghemat anggarannya dengan baik dan dana yang kurang dari 100% dapat digunakan melaksanakan semua kegiatan yang sudah direncanakan. Berdasarkan persentase penilaian efisiensi masuk dalam kategori sangat efisien.

(b) Tahun 2020

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\% \text{Output}}{\% \text{Input}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{79\%} \times 100\%$$

$$= 126,58\%$$

Pada hasil perhitungan di atas bahwa program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya pada tahun 2020 dengan kegiatan Peningkatan Kemampuan (*Capacity Building*) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainnya. terlaksananya Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin.

Menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 126,58%. Dimana hasil persentase lebih dari 100% yang berarti bahwa program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Lainnya dapat menghemat anggarannya dengan baik dan dana yang kurang dari 100% dapat digunakan melaksanakan semua kegiatan yang sudah direncanakan. Berdasarkan persentase penilaian efisiensi masuk dalam kategori sangat efisien.

(c) Tahun 2021

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio efisiensi} &= \frac{\% \text{Output}}{\% \text{Input}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{80\%} \times 100\% \\ &= 125\% \end{aligned}$$

Pada hasil perhitungan di atas bahwa program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya pada tahun 2021 dengan kegiatan Peningkatan Kemampuan (*Capacity Building*) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainnya, terlaksananya Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin.

Menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 125%. Dimana hasil persentase lebih dari 100% yang berarti bahwa program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Lainnya dapat menghemat anggarannya dengan baik dan dana yang kurang dari 100% dapat digunakan melaksanakan semua kegiatan yang sudah direncanakan. Berdasarkan persentase penilaian efisiensi masuk dalam kategori sangat efisien.

3) Nilai Efektivitas

(a) Tahun 2019

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\% \text{ Outcome}}{\% \text{ Output}} \times 100\%$$

$$= \frac{89\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 89\%$$

Dengan dihasilkannya nilai 89% ini, Berdasarkan persentase efektivitas dapat dikatakan bahwa Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial terlaksana dengan efektif, yang berarti bahwa program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, pada tahun 2019 telah berhasil mencapai tujuan yang telah diharapkan.

(b) Tahun 2020

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\% \text{ Outcome}}{\% \text{ Output}} \times 100\%$$

$$= \frac{79\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 79\%$$

Dengan dihasilkannya nilai 79% ini, Berdasarkan persentase efektivitas dapat dikatakan bahwa Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial terlaksana dengan cukup efektif, yang berarti bahwa program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, pada tahun 2020 telah berhasil mencapai tujuan yang telah diharapkan.

(c) Tahun 2021

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\% \text{ Outcome}}{\% \text{ Output}} \times 100\%$$

$$= \frac{87\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 87\%$$

Dengan dihasilkannya nilai 87% ini, Berdasarkan persentase efektivitas dapat dikatakan bahwa Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial terlaksana dengan efektif, yang berarti bahwa program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, pada tahun 2021 telah berhasil mencapai tujuan yang telah diharapkan.

2. Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi korban bencana alam dan sosial, sehingga dapat memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), terlaksananya bantuan sosial bagi korban

tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah dan terlaksananya sistem jaminan sosial kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah kumuh dan PMKS lainnya. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Bendahara, program ini mendapatkan dana setiap tahunnya, dimana dana yang diperoleh pada tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut⁴¹:

Tabel IV.5
Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
Tahun 2019-2021(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Tahun	Anggaran program (Biaya <i>Input</i>)	Realisasi anggaran
1	2019	186.305.993	178.928.275
2	2020	139.343.819	118.442.246
3	2021	144.766.312	115.812.249

Untuk mengetahui apakah program perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial, di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektivitas jika diukur dengan konsep *value for money*, maka langkah-langkah pengukuran *vaue for money* pada program perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial lainnya adalah sebagai berikut:

1) Nilai ekonomi

(a) Tahun 2019

$$\text{Rasio ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio ekonomi} = \frac{\% \text{Input}}{\% \text{Biaya Input}} \times 100\%$$

⁴¹Bendahara Keuangan Dinas Sosial. Kabupaten Mandailing Natal.

$$= \frac{96,04\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 96,4\%$$

Pada hasil perhitungan di atas bahwa program Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial pada tahun 2019 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 96,4%. Berdasarkan persentase penilaian ekonomi kinerja Dinas Sosial dalam program program perlindungan dan jaminan sosial masuk dalam kategori sangat ekonomis karena dapat meminimalisir anggarannya dengan baik, dengan cara menghindari pengeluaran yang boros dan pengeluaran yang tidak produktif.

(b) Tahun 2020

$$\text{Rasio ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio ekonomi} = \frac{\% \text{Input}}{\% \text{Biaya Input}} \times 100\%$$

$$= \frac{85\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 85\%$$

Pada hasil perhitungan di atas bahwa program Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial pada tahun 2020 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 85%. Berdasarkan persentase penilaian ekonomi kinerja Dinas Sosial dalam

program program perlindungan dan jaminan sosial masuk dalam kategori ekonomis karena dapat meminimalisir anggarannya dengan baik, dengan cara menghindari pengeluaran yang boros dan pengeluaran yang tidak produktif.

(c) Tahun 2021

$$\text{Rasio ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio ekonomi} = \frac{\% \text{Input}}{\% \text{Biaya Input}} \times 100\%$$

$$= \frac{80\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 80\%$$

Pada hasil perhitungan diatas bahwa program Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial pada tahun 2021 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 80%. Berdasarkan persentase penilaian ekonomi kinerja Dinas Sosial dalam program-program perlindungan dan jaminan sosial masuk dalam kategori ekonomis karena dapat meminimalisir anggarannya dengan baik, dengan cara menghindari pengeluaran yang boros dan pengeluaran yang tidak produktif.

2) Nilai Efisiensi

(a) Tahun 2019

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\% \text{Output}}{\% \text{Input}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{96,4\%} \times 100\%$$

$$= 104,12\%$$

Pada hasil perhitungan di atas bahwa program perlindungan dan jaminan sosial pada tahun 2019 menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 104,12%. Dimana hasil persentase lebih dari 100% yang berarti bahwa program perlindungan dan jaminan sosial menghemat anggarannya dengan baik dan dana yang kurang dari 100% dapat digunakan melaksanakan semua kegiatan yang sudah direncanakan. Berdasarkan persentase penilaian efisiensi masuk dalam kategori sangat efisien.

(b) Tahun 2020

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\% \text{Output}}{\% \text{Input}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{85\%} \times 100\%$$

$$= 117,64\%$$

Pada hasil perhitungan di atas bahwa program perlindungan dan jaminan sosial pada tahun 2020 menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 117,64%. Dimana hasil persentase lebih

dari 100% yang berarti bahwa program perlindungan dan jaminan sosial menghemat anggarannya dengan baik dan dana yang kurang dari 100% dapat digunakan melaksanakan semua kegiatan yang sudah direncanakan. Berdasarkan persentase penilaian efisiensi masuk dalam kategori sangat efisien.

(c) Tahun 2021

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\% \text{Output}}{\% \text{Input}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$= 125\%$$

Pada hasil perhitungan di atas bahwa program perlindungan dan jaminan sosial pada tahun 2021 menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 125%. Dimana hasil persentase lebih dari 100% yang berarti bahwa program perlindungan dan jaminan sosial menghemat anggarannya dengan baik dan dana yang kurang dari 100% dapat digunakan melaksanakan semua kegiatan yang sudah direncanakan. Berdasarkan persentase penilaian efisiensi masuk dalam kategori sangat efisien.

3) Nilai efektivitas

(a) Tahun 2019

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\% \text{ Outcome}}{\% \text{ Output}} \times 100\%$$

$$= \frac{89\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 89\%$$

Dengan dihasilkannya nilai 89% ini, Berdasarkan persentase efektivitas dapat dikatakan bahwa Program perlindungan dan jaminan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial terlaksana dengan efektif, yang berarti bahwa program perlindungan dan jaminan sosial, pada tahun 2019 telah berhasil mencapai tujuan yang telah diharapkan.

(b) Tahun 2020

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\% \text{ Outcome}}{\% \text{ Output}} \times 100\%$$

$$= \frac{79\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 79\%$$

Dengan dihasilkannya nilai 79% ini, Berdasarkan persentase efektivitas dapat dikatakan bahwa Program perlindungan dan jaminan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial terlaksana dengan cukup efektif, yang berarti bahwa

program perlindungan dan jaminan sosial, pada tahun 2020 telah berhasil mencapai tujuan yang telah diharapkan.

(c) Tahun 2021

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\% \text{ Outcome}}{\% \text{ Output}} \times 100\%$$

$$= \frac{87\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 87\%$$

Dengan dihasilkannya nilai 87% ini, Berdasarkan persentase efektivitas dapat dikatakan bahwa Program perlindungan dan jaminan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial terlaksana dengan efektif, yang berarti bahwa program perlindungan dan jaminan sosial, pada tahun 2021 telah berhasil mencapai tujuan yang telah diharapkan.

3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial dan memberikan bantuan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para PMKS untuk kelangsungan hidup dan pengembangannya. Program ini juga bertujuan agar terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasana rehabilitasi sosial; terlaksananya pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban eksploitasi perdagangan

perempuan dan anak serta korban tindak kekerasan, terlaksananya pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak disabilitas, dan anak nakal serta lanjut usia; terlaksananya pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma center dan terlaksananya kampanye, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi serta konseling mengenai arti eksploitasi perdagangan perempuan dan anak, kekerasan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya, Menurut hasil wawancara dengan Bapak Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, program ini mendapatkan dana setiap tahunnya, dimana dana yang diperoleh pada tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.6
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Tahun 2019-2021(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Tahun	Anggaran program (Biaya <i>Input</i>)	Realisasi anggaran
1	2019	251.925.512	209.098.174
2	2020	206.392.843	179.561.773
3	2021	248.924.605	211.600.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal

Untuk mengetahui apakah program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektivitas jika diukur dengan konsep *value for money*, maka langkah-langkah pengukuran *vaue for*

money pada program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial lainnya adalah sebagai berikut⁴²:

1) Nilai ekonomi

(a) Tahun 2019

$$\text{Rasio ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio ekonomi} = \frac{\% \text{Input}}{\% \text{Biaya Input}} \times 100\%$$

$$= \frac{83\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 83\%$$

Pada hasil perhitungan di atas bahwa program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada tahun 2020 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 83%. Berdasarkan persentase penilai ekonomi kinerja Dinas Sosial dalam program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial masuk dalam kategori ekonomis karena dapat meminimalisir anggarannya dengan baik, dengan cara menghindari pengeluaran yang boros dan pengeluaran yang tidak produktif.

(b) Tahun 2020

$$\text{Rasio ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio ekonomi} = \frac{\% \text{Input}}{\% \text{Biaya Input}} \times 100\%$$

⁴²Muhammad Ali, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, 27 juli pukul 14.00 WIB.

$$= \frac{87\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 87\%$$

Pada hasil perhitungan di atas bahwa program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada tahun 2020 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 87%. Berdasarkan persentase penilain ekonomi kinerja Dinas Sosial dalam program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial masuk dalam kategori ekonomis karena dapat meminimalisir anggarannya dengan baik, dengan cara menghindari pengeluaran yang boros dan pengeluaran yang tidak produktif.

(c) Tahun 2021

$$\text{Rasio ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio ekonomi} = \frac{\% \text{Input}}{\% \text{Biaya Input}} \times 100\%$$

$$= \frac{85\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 85\%$$

Pada hasil perhitungan di atas bahwa program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial pada tahun 2021 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 85%. Berdasarkan persentase penilain ekonomi kinerja Dinas Sosial dalam program

pelayanan dan rehabilitasi masuk dalam kategori ekonomis karena dapat meminimalisir anggarannya dengan baik, dengan cara menghindari pengeluaran yang boros dan pengeluaran yang tidak produktif.

2) Nilai Efisiensi

(a) Tahun 2019

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\% \text{Output}}{\% \text{Input}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{83\%} \times 100\%$$

$$= 120,48\%$$

Pada hasil perhitungan di atas bahwa program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial pada tahun 2019 menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 120,48%. Dimana hasil persentase lebih dari 100% yang berarti bahwa program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial menghemat anggarannya dengan baik dan dana yang kurang dari 100% dapat digunakan melaksanakan semua kegiatan yang sudah direncanakan. Berdasarkan persentase penilaian efisiensi masuk dalam kategori sangat efisien.

(b) Tahun 2020

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\% \text{Output}}{\% \text{Input}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{87\%} \times 100\%$$

$$= 114,95\%$$

Pada hasil perhitungan di atas bahwa program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial pada tahun 2020 menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 114,95%. Dimana hasil persentase lebih dari 100% yang berarti bahwa program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial menghemat anggarannya dengan baik dan dana yang kurang dari 100% dapat digunakan melaksanakan semua kegiatan yang sudah direncanakan. Berdasarkan persentase penilaian efisien masuk dalam kategori sangat efisien.

(c) Tahun 2021

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\% \text{Output}}{\% \text{Input}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{85\%} \times 100\%$$

$$= 117,64\%$$

Pada hasil perhitungan di atas bahwa program pelayanan dan rehailitasi kesejahteraan sosial pada tahun 2021 menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 117,64%. Dimana hasil persentase lebih dari 100% yang berarti bahwa program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial menghemat anggarannya dengan baik dan dana yang kurang dari 100% dapat digunakan melaksanakan semua kegiatan yang sudah direncanakan. Berdasarkan persentase penilaian efisiensi masuk dalam kategori sangat efisien.

3) Nilai efektivitas

(a) Tahun 2019

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\% \text{ Outcome}}{\% \text{ Output}} \times 100\%$$

$$= \frac{89\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 89\%$$

Dengan dihasilkannya nilai 89% ini, Berdasarkan persentase efektivitas dapat dikatakan bahwa Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial terlaksana dengan efektif, yang berarti bahwa program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan

sosial, pada tahun 2019 telah berhasil mencapai tujuan yang telah diharapkan.

(b) Tahun 2020

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\% \text{ Outcome}}{\% \text{ Output}} \times 100\%$$

$$= \frac{79\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 79\%$$

Dengan dihasilkannya nilai 79% ini, Berdasarkan persentase efektivitas dapat dikatakan bahwa Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial terlaksana dengan cukup efektif, yang berarti bahwa program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, pada tahun 2020 telah berhasil mencapai tujuan yang telah diharapkan.

(c) Tahun 2021

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\% \text{ Outcome}}{\% \text{ Output}} \times 100\%$$

$$= \frac{87\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 87\%$$

Dengan dihasilkannya nilai 87% ini, Berdasarkan persentase efektivitas dapat dikatakan bahwa Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial terlaksana dengan efektif, yang berarti bahwa program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, pada tahun 2021 telah berhasil mencapai tujuan yang telah diharapkan.

D. Keterbatasan Peneliti

Pelaksanaan penelitian ini telah dilakukan dengan langkah-langkah yang sesuai dengan metodologi penelitian agar hasil yang diperoleh sebaik mungkin. Namun dalam prosesnya, untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit, sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan seperti di bawah ini:

1. Letak lokasi penelitian yang cukup memakan waktu sehingga kurangnya waktu dalam penelitian.
2. Keterbatasan waktu, tenaga, serta dana penulis yang tidak mencukupi untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut.
3. Keterbatasan waktu, tenaga, serta dana penulis yang tidak mencukupi untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut.
4. Keterbatasan ilmu pengetahuan, wawasan dan literatur yang ada pada penulis khususnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas juga menjadi salah satu kendala dalam penulisan skripsi ini.

Keterbatasan-keterbatasan yang ada di atas memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan peneliti dan selanjutnya berpengaruh pula terhadap hasil yang diperoleh. Namun dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh peneliti ditambah dengan kerja keras dan juga dengan bantuan semua pihak, peneliti berusaha untuk meminimalkan hambatan yang dihadapi, karena adanya faktor keterbatasan tersebut sehingga bisa menghasilkan skripsi ini meskipun masih dalam bentuk yang sederhana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada program pemberdayaan fakir miskin, komunitas dan adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya pada tahun 2019 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 81% ,pada tahun 2020 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 79% masuk dalam kategori cukup ekonomis, pada tahun 2021 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 80%. masuk dalam kategori ekonomis, serta berjalan secara efisien dan efektivitas.
2. Pada program perlindungan dan jaminan sosial pada tahun 2019 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 96,04% dalam persentase masuk dalam kategori sangat ekonomis, pada tahun 2020 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 85% masuk dalam kategori ekonomis, dan pada tahun 2021 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 80%. masuk dalam kategori ekonomis, serta berjalan secara efisien dan efektivitas
3. Pada program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial pada tahun 2019 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 83% dalam persentase masuk dalam kategori ekonomis, pada tahun 2020 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 87% masuk dalam kategori ekonomis, dan pada tahun 2021 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar

85%. masuk dalam kategori ekonomis, serta berjalan secara efisien dan efektivitas.

B. Saran

Setelah peneliti melalui semua tahapan-tahapan dan berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini ada beberapa saran yang peneliti rangkum untuk perbaikan penelitian di masa yang akan datang. Sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik mengenai judul analisis kinerja keuangan pada kegiatan Dinas Sosial dengan menggunakan konsep *Value For Money* agar lebih menggali lagi kegiatan-kegiatan dinas Sosial selain dari kegiatan-kegiatan yang sudah dimuat dalam penelitian ini.
2. Untuk instansi sektor publik khususnya Dinas Sosial agar memperhatikan kegiatan-kegiatan ataupun program yang berkualitas untuk lebih memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul halim Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Al-fatih, *Al-qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, AN-Najm Ayat 39, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2020.
- Al-fatih, *Al-qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, At-Taubah Ayat 105, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2020.
- Arfa Ikhsan dan Imam Ghozali, *Metode Penelitian Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, Medan: PT. Madju Medan Cipta, Cet Ke-1, 2006.
- Badan Pusat statistik. "Persentase Penduduk Miskin Mandailing Natal." Badan pusat Statistik kabupaten Mnadailing natal, 2020.
- coulter, Stephen P. Robbin mary. *Manajemen*. Indonesia: PT. Macanalaya Cemerlang, 2019.
- Debby tamara Enre. "Analisis Value for Money Anggaran Pendapatan Pada Kota Medan." Skripsi, Universitas Islam Negri Sumatera Utara, 2020.
- Deddi Armansyah. Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas sosial. Wawancara, 27 juli Pukul 11.00 WIB.
- dkk, Haryanto. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2019.
- Elidawaty Purba, dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Yayasan Kita Menulis, 2021).
- Gary dessler. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Intan Sejati Klaten, 2013.
- Indrayani Khairunnisa. "Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016)." *Dalam Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 6 No.1 (2018).
- Jumaina Septariani. "Penerapan Konsep Value for Money Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Good Government Government (Tata Kelola Pemerintah Yang Baik) Pada Kabupaten Musi Banyuasin." *Jurnal Penerapan Konsep Value for Money*, 2016.

———. “Penerapan Konsep Value for Money pada Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Good Government (Tata Kelola Pemerintah Yang Baik) Pada Kabupaten Banyuwangi.” *Dalam Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2016.

Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.

———. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.

———. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2018.

———. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2019.

———. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2020.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. “Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020,” 2020.

Muhammad Syam Kusufi, Abdul halim. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.

Nova Kurniawati dan vidya Vitta Adhivinna. “Analisis Penerapan Konsep Value for Money Pada Pemerintah Kabupaten Bantul.” *Dalam Jurnal Analisis Penerapan Konsep Value for Money Pada Pemerintah*, 2017.

R. Wayne Mondy. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga, 2020.

Risa Dwi Agustin. “Konsep Value for Money Dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Sektor Publik.” *Dalam Jurnal Ilmu Riset Dan Akuntansi* 6 No.6 (2017).

———. *Konsep Value for Money Dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Sektor Publik*. Vol. 6 no.6. dalam jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 2017.

Riski halomoan. Bendahara Keuangan Dinas Sosial. Wawancara, 27 juli Pukul 15.00 WIB.

Sayuti jamalluddin. “Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas Dan Konsep Value for Money Dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan).” *Dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1.no.1 (2018).

Stephen P. Robbin /mary coulter, *Manajemen* (Indonesia: PT. Macanalaya Cemerlang, 2019)..

Zhalsa Ramadhani Nur Hidayat. “Pengukuran Kinerja Program Bantuan Sosial Covid-19 Dengan Menggunakan Indikator Value for Money Pada

Pemerintahan Kota Makassar.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Nur Hatikah Siregar
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat/Tanggal Lahir: Bungabondar, 02 Juni 2000
4. Anak Ke : 3 (tiga) dari empat Bersaudara
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Status : Mahasiswi
7. Agama : Islam
8. Alamat Lengkap : Kel.Bungabondar,Kec.Sipirok,Kab.Tapanuli Selatan
9. Telepon/HP : 0823-6933-2887
10. E-mail : nurhatikahsiregar@gmail.com

B. NAMA ORANG TUA

1. Nama
Ayah : Arif Siregar
Ibu : Nurma Hutasuhut
2. Pekerjaan
Ayah : Tani
Ibu : Tani

3. Alamat

Ayah : Bungabondar

Ibu : Bungabondar

C. PENDIDIKAN

1. SD Negeri Bungabondar (2006-2012)
2. MTsN 01 Sipirk (2012-2015)
3. MAN 01 Sapirok (2015-2018)
4. UIN SYAHADA Padangsidempuan (2018 - 2022)

D. MOTTO HIDUP

“Hasbunallah wa Nikmal Wakil”



Wawancara dengan Bapak Deddi Armansyah Batubara (Kabid Program Fakir Miskin, KAT, dan PMKS lainnya) Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal.



Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali (Kabid Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial) Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal.



Wawancara dengan Bapak Riski Halomoan (Bendahara Keuangan) Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal.

